



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. AMIR HUSIN
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 446062

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/30 m2 di KOTA BALIKPAPAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/45 m2 di BANJAR, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 81.500.000

1. MOBIL, SIRION DAIHATSU Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
75.000.000
2. MOTOR, HONDA SPIN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SCOPY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.527.566

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 821.027.566

III. HUTANG Rp. 22.124.578

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 798.902.988

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.